

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Juni  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.822.826.814	42,21	42,21	0	32.493.444.673	37,43	26.640.860.461	30,68	6,75						
01.01	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.997.600	82,8	82,8	0	7.947.700	79,5	7.795.022	77,97	1,53						
01.01.01	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.998.000	100	100	0	3.998.000	100	3.998.000	100	0			BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Dokumen RENSTRA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen RENJA Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Dokumen RENJA Perangkat Daerah Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Dokumen Perjanjian Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Berita Acara Forum OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Dokumen ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah</p> <p>2. Tersusunya Berita Acara Forum Perangkat Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Sudah sesuai target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>

01.01.02	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.999.900	72	72	0	2.700.000	67,5	2.637.322	65,93	1,57	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen DPA SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen DPA SKPD Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya dokumen DPA BPKA tahun 2024</p> <p>2. Tersedianya dokumen RKA BPKA tahun 2024</p> <p>3. Proses usulan revisi DPA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 362.478,- terdiri dari : 1. Belanja ATK sebesar Rp. 5.000,- dan Belanja bahan komputer sebesar Rp. 57.478,- karena terdapat selisih harga dengan marketplace</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
----------	-------------------	---------------------------------------	-----------	----	----	---	-----------	------	-----------	-------	------	----------	--	---	---

01.01.03	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.700	70	70	0	1.249.700	62,49	1.159.700	57,99	4,5	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya laporan Monev Bulan Mei</p> <p>2. Terlaksananya input revisi data ROPK Perangkat daerah Tahun 2024</p> <p>3. Tersusunnya dokumen LKJiP 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target , terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- berupa Belanja cetak dan penggandaan, dikarenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
01.02	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.192.265.894	41,98	41,98	0	31.244.828.253	37,11	25.507.536.620	30,3	6,81			<p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang dari 240 Orang</p> <p>2. Gaji dan Tunjangan ASN : 240 Orang dari 240 Orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY bulan Juni</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY Bulan Juni</p> <p>3. Tersusunnya SPM kekurangan gaji</p>

01.02.01	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.182.746.394	41,98	41,98	0	31.236.691.403	37,11	25.499.938.270	30,29	6,82	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Juni , Terapat Deviasi keuangan sebesar Rp. 5.736.753.132,- terdiri dari : 1. Belanja Gai Pokok PNS Rp. 2.515.522.800,- 2. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 450.558.408,- 3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 204.277.598,- 4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp. 135.200.000,- 5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp. 73.480.000,- 6. Belanja Tunangan Fungsional Umum PNS Rp. 83.253.575,- 7. Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 102.360.500,- 8. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS Rp. 11.575.468,- 9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 37.975,- 10. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 132.182.995,- 11. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp. 17.395.840,- 12. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 3.520.711,- 13. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp. 511.118,- 14. Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp. 10.562.121,-
----------	-------------------	-----------------------------------	----------------	-------	-------	---	----------------	-------	----------------	-------	------	----------	---	--

																			15. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp. 7.472.759,- 16. Belanja simpanan Taperum Rp. 1.665.462.239,- 17. Belanja TPP PNS Rp. 237.194.019,- 18. Belanja TPP PPPK Rp. 71.531.680,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.02.02	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.520.000	51,9	51,9	0	760.000	50	760.000	50	0	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Tersedianya dokumen Penatausahaan / realisasi anggaran bulan Juni  2. Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban SPJ bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai target <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY				

01.02.03	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	100	100	0	4.999.800	100	4.617.700	92,36	7,64	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Laporan Keuangan Un Audited dan Audited : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>3. SDM yang kompeten</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Dokumen laporan keuangan Un Audited</p> <p>2. Tersusunnya dokumen laporan keuangan Audited</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sesuai target selesai 100% terdapat efisiensi sebesar Rp. 382.100,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
01.02.04	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	2.999.700	80	80	0	2.377.050	79,24	2.220.650	74,03	5,21	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 0 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Dokumen Prognosis : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya laporan keuangan sampai denagn bulan Juni</p> <p>2.. Tersusunnya laporan penerimaan bulan Juni</p> <p>3. Tersusunnya laporan pengeluaran bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

		SKPD																Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 156.400,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.03	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.400.000	50	50	0	700.000	50	700.000	50	0							
01.03.01	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.400.000	50	50	0	700.000	50	700.000	50	0	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Bulan dari 12 Bulan 2. Dokumen Laporan BMD : 6 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedia data penerimaan barang sampai dengan bulan Juni 2. Tersusunnya laporan persediaan barang bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> REalisasi sesuai target <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten			
01.04	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.215.000	62,5	62,5	0	4.565.000	55,57	4.175.500	50,83	4,74							

01.04.01	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.215.000	62,5	62,5	0	4.565.000	55,57	4.175.500	50,83	4,74	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai : 6 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi kepegawaian antar bidang</li> <li>2. Terkoreksinya presensi pegawai bulan Juni</li> <li>3. terselesaikannya peremajaan data pegawai</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- terdiri dari : sisa angkas pada 1. Belanja Alat Tulis kantor (efisiensi) sebesar Rp. 28.000,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 192.000,- 3. Belanja cetak sebesar Rp. 140.000,- dan Belanja makan minum rapat Rp. 30.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol>
01.05	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.542.500	54,38	54,38	0	352.169.700	51,67	319.726.718	46,91	4,76			
														<p>1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>



01.05.01	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.279.000	54	54	0	4.938.000	53,22	4.586.000	49,42	3,8	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>2. Paket Komponen Instalasi Listrik : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 352.000,- berupa sisa angkas sampai dengan bulan mei di karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3.SDM yang kompeten</p>
														<p>1. Jumlah Paket Peralatandan Perengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 5 Paket</p> <p>2. Paket Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Paket Alat Tulis kantor : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Paket Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Paket Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedia nya Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Tersedia nya kertas dan cover</p> <p>3. Tersedia nya bahan komputer</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

01.05.02	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.153.900	48,9	48,9	0	60.831.400	45,34	57.685.250	43	2,34	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	6. Paket Bahan Kegiatan Kantor Lainnya : 0 Paket dari 1 Paket	Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.145.550,- terdiri dari : belum di belanjakan : 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.044.440,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 620.510,- 3. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 1.412.600,- dan 4. Belanja bahan lainnya Rp. 108.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.05.03	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.926.500	54	54	0	9.293.700	51,84	8.566.700	47,79	4,05	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket 2. Paket Peralatan Rumah Tangga : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedia nya perabot kantor berupa bahan kebersihan ruangan 2. Tersedia nya bahan kebersihan kendaraan 3. Tersedia nya bahan kebersihan lantai <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 736.000,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Juni <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024

																	2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.05.04	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.874.500	56	56	0	44.968.000	49,48	40.119.850	44,15	5,33	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 3 Paket</p> <p>2. Paket Pengadaan Kotak Arsip : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Paket Barang Cetakan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Paket Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedia nya bahan cetak berupa kotak arsip</p> <p>3. Tersedianya bahan cetak berupa amplop berkop coklat casing</p> <p>4. Tersedianya bahan cetak berupa stopmap berkop</p> <p>5. Terpenuhinya penggandaan dokumen surat surat dinas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.641.600,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Juni, di karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>		
																	<p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn yang Disediakan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>

01.05.05	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.232.000	53,5	53,5	0	5.616.000	50	4.350.000	38,73	11,27	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>2. Bahan bacaan berupa Koran : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Bahan bacaan berupa Majalah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Bahan bacaan berupa Surat Kabar : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>1. Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar bulan Juni</p> <p>2. Tersedianya bahan bacaan berupa majalah bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.266.000,- Belanja bersifat persediaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
														<p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>2. Laporan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya jamuan makan minum koordinasi internal</p> <p>2. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan kerja Pansus II LKPJ bidang Ekonomi DPRD Propinsi Kalimantan SELatan tanggal 26 April</p> <p>3. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Mei 2024</p>

01.05.06	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.164.000	56	56	0	203.295.000	54,92	182.966.318	49,43	5,49	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>4. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari DPRD Propinsi Bali tanggal 23 April 2024</p> <p>5. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari BPKD Propinsi Bangka belitung tanggal 17 April 2024</p> <p>6. Terlaksananya Sosialisasi whistie system dan pengendalian gratifikasi tanggal 30 dan 31 Mei 2024</p> <p>4. Terlaksananya konsultasi luar daerah ke Jakarta dalam mengirimn SPP Dais tahap II TA 20240 tanggal 08 Mei 2024</p> <p>5. Terlaksananya konsultasi luar daerah ke jakarta dalam rangka Menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 22 - 23 april 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 20.328.692,- terdiri dari : Belum di belanjakan :</p> <p>1. Belanja kertas dan cover Rp. 138.000,- 2. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 15.255.000,- 3. Belanja honorarium Rp. 2.000.000,- dan Belanja Perjalanan dinas sebesar Rp. 2.927.282,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p>
----------	-------------------	--	-------------	----	----	---	-------------	-------	-------------	-------	------	----------	------------------------------	--

																		2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.05.07	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.912.600	54,5	54,5	0	23.227.600	48,48	21.452.600	44,77	3,71							1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis : 6 Dokumen dari 12 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya pengendalian hama bulan Juni 2. Tersusunnya dokumen arsip 3. Terlaksananya penatausahaan surat masuk 4. Terlaksananya penatausahaan surat keluar <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sesuai target pada bulan Juni, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.775.000,- terdiri dari : 1. Belanja makan dan minum rapat Rp. 675.000,- dalam proses SPJ dan Belanja pengendalian hama sebesar Rp. 1.100.000,- merupakan sisa angkas <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten

01.06	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.632.000	100	100	0	30.632.000	100	30.049.998	98,1	1,9						
01.06.01	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.632.000	100	100	0	30.632.000	100	30.049.998	98,1	1,9	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya : Unit dari 9 Unit 2. Komputer : 2 Unit dari 2 Unit 3. Keyboard dan Mouse : 4 Unit dari 4 Unit 4. Monitor : 3 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedia nya CPU 2. Tersedia nya Monitor komputer LED 3. Tersedia nya Keyboard <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi sebesar Rp. 582.002 <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten		
01.07	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.535.100	45,24	45,24	0	687.377.800	44,3	612.624.843	39,49	4,81						
01.07.01	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.450.000	57	57	0	5.000.000	27,1	3.800.000	20,6	6,5	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Penyediaan Materai : 350 Buah dari 1685 Buah 3. Pengiriman dokumen : 4 Kg dari 16 Kg	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedia nya jasa surat berupa benda pos (materai) <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran merupakan persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- terdiri dari : 1. Belanja benda pos (materai) sebesar Rp. 1.100.000,- dan Belanja jasa pengiriman sebesar Rp. 100.000,-		





																			1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
01.07.03	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.992.000	38,5	38,5	0	27.722.000	36,48	25.953.570	34,15	2,33		BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 6 Laporan 2. Sewa Pengharum Ruangan : 1 Laporan dari 2 Laporan 3. Sewa Mesin Fotocopy : 1 Laporan dari 2 Laporan  4. Sewa Tanaman : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarkannya belanja sewa peralatan kantor, sewa mesin fotocopy bulan JUni  <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.646.430,- terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover Rp. 192.000,- 2. Belanja sewa pengharum ruangan Rp. 146.430,- merupakan sisa angkas dan Belanja sewa mesin fotocopy sebesar Rp. 1.500.000,- merupakan sisa angkas  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten			

01.07.04	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.372.000	36,35	36,35	0	193.274.000	36,17	191.781.000	35,89	0,28					<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>2. Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan : 6 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor sampai dengan bulan Mei</p> <p>2. Terpenuhinya jasa pengamanan gudang kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.493.000,- terdiri dari : sisa angkas 1. Belanja jasa kebersihan Rp. 729.699,- dan 2. Belanja jasa tenaga keamanan Rp. 881.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
01.08	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.238.720	51,54	51,54	0	165.224.220	47,58	158.251.760	45,57	2,01						
																<p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas jabatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

01.08.01	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.811.000	12,5	12,5	0	1.080.000	9,99	1.050.000	9,71	0,28	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 30.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten	
														1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 0 Unit dari 17 Unit 2. Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 : 10 Unit dari 10 Unit 3. Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan dinas operasional bulan Juni 2. Terbayarkannya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 AB 1500 IF 3. Terbayarkannya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 AB 2864 IS dan AB 2651 IH <b>Faktor Penghambat:</b>

01.08.02	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.187.720	42	42	0	81.954.220	37,05	77.449.510	35,02	2,03	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.504.710,- terdiri dari : 1. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Rp. 1.098.590,- 2. Belanja penggantian suku cadang Rp. 405.000,- 3. Belanja pajak kendaraan Rp. 1.638.200,- 4. Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp. 50.000,- dan Belanja pemeliharaan dinas roda 2 Rp. 1.312.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol>
														<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 77 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Sepeda Roda Dua : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>3. Pemeliharaan Projector : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>4. Pemeliharaan CCTV : 8 Unit dari 8 Unit</p> <p>5. Pemeliharaan Meubelair : 11 Unit dari 11 Unit</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terpeliharanya LCD Proyektor</li> <li>2. Terlaksananya pemeliharaan Printer 4 unit</li> <li>3. Terlaksananya pemeliharaan Komputer 4 unit</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

01.08.03	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.240.000	59,2	59,2	0	32.190.000	58,27	30.290.000	54,83	3,44	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>6. Pemeliharaan AC Central : 2 Unit dari 5 Unit</p> <p>7. Pemeliharaan AC Split : 9 Unit dari 15 Unit</p> <p>8. Pemeliharaan Notebook/Laptop : 9 Unit dari 23 Unit</p> <p>9. Pemeliharaan Printer : 4 Unit dari 10 Unit</p>	<p>Dikarenakan anggaran merupakan persediaan , sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp. 1.900.000,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja pemeliharaan mesin ketik Rp. 400.000, 2. Belanja Pemeliharaan CCTV Rp. 1.100.000,- dan Belanja Pemeliharaan AC Rp. 380.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
01.08.04	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	86,7	86,7	0	50.000.000	83,33	49.462.250	82,44	0,89	BPKA DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Paket dari 4 Paket</p> <p>2. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Depo Arsip : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pemeliharaan Gudang : 1 Paket dari 2 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya pemeliharaan bangunan gudang badran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 37.750,- adalah efisiensi pada pemeliharaan gedung kantor dan terdapat sisa angkas pemeliharaan gudang sebesar Rp. 500.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

																		1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
2	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	#####	59,06	59,06	0	823.538.215.239	57,19	610.102.029.729	42,37	14,82							
02.01	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	354.549.500	31,6	31,6	0	93.054.750	26,25	63.426.418	17,89	8,36							
02.01.01	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41.351.950	54	54	0	21.150.000	51,15	15.061.539	36,42	14,73	BPKA DIY	Bidang Anggaran Belanja - Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Dokumen KUA : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen PPAS : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan draf KUA PPAS tahun 2025 <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 6.088.461,- terdiri dari : 1. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 5.338.461,- (merupakan sisa pengadaan, sifatnya eksternal) dan Belanja makan dan minum rapat Rp. 750.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten			

02.01.02	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.172.800	54	54	0	19.500.000	49,78	14.930.505	38,11	11,67	BPKA DIY	Bidang Anggaran Belanja - Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan	<p>1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen KUA Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen PPAS Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>rapat koordinasi internal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.794.495,- terdiri dari :  1. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 3.819.495,- (merupakan sisa pengadaan, sifatnya eksternal)  2. Belanja makan dan minum rapat Rp. 975.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024  2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY  3. SDM yang kompeten</p>
														<p>1. Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi : 0 Dokumen dari 32 Dokumen</p> <p>2. Dokumen DPA - SKPD : 32 Dokumen dari 32 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Mengadakan Rapat untuk membahas usulan pergeseran anggaran tahun 2024 antara TAPD bersama dengan OPD yang mengusulkan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

02.01.03	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	12.366.000	77	77	0	9.139.000	73,9	8.088.000	65,41	8,49	BPKA DIY	Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Perekonomian	Setelah didapatkan kesepakatan dalam forum rapat, pergeseran sedang dalam proses sampai akhir bulan Juni masih di tahap penganggaran.  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.051.000,- terdiri dari : Belanja pembelian bahan komputer sebesar Rp. 1.018.000,- dan belanja alat tulis kantor Rp. 33.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> Didapatkannya pemahaman bersama antara TAPD dan OPD bahwa pergeseran sedang berproses.
02.01.04	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	82.683.750	35	35	0	21.783.750	26,35	17.578.707	21,26	5,09	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN	1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Perda APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Perkada Penjabaran APBD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya dokumen Perda APBD tahun anggaran 2024 2. Tersusunnya dokumen Pergub APBD tahun anggaran 2024 3. Tersusunnya Pergeseran Anggaran tahap 1 pada Bulan April 2024 4. Rencana Pergeseran Anggaran tahap 2 masih menunggu Berita Acara Pembahasan Dais  <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.555.707,- terdiri dari :



		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										ASET - Bidang Anggaran Belanja	<p>1. Belanja kertas dan cover Rp. 385.493,- 2. Belanja cetak Rp. 2.271.550,- realisasi menyesuaikan kebutuhan (merupakan faktor eksternal, pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais) 3. Belanja makanminum rapat sebesar Rp.683.493,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>	
													<p>1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD : 0 Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Perda Perubahan APBD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Perkada Penjabaran Perubahan APBD : 1 Dokumen dari 5 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya Pergub No 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Pergub No 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024</p> <p>2. Tersusunnya Pergeseran Anggaran tahap 1 pada Bulan April 2024</p> <p>3. Rencana Pergeseran Anggaran tahap 2 masih menunggu Berita Acara Pembahasan Dais</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

02.01.05	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	101.475.000	29	29	0	20.807.000	20,5	7.092.667	6,99	13,51	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Anggaran Belanja	<p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 13.714.333,- dengan rincian (merupakan faktor eksternal, pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.492.742,-</li> <li>2. Belanja bahan cetak Rp. 8.466.600,- dikarenakan sesuai kebutuhan (merupakan faktor eksternal, pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais)</li> <li>3. Belanja alat listrik sebesar Rp. 280.000,-</li> <li>4. Belanja makan dan minum rapat Rp. 1.425.000,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol>	
														<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran : Dokumen dari 30 Dokumen</li> <li>2. Keputusan Gubernur Penetapan Bendahara dan KPA BOS : Dokumen dari 2 Dokumen</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>masih dalam proses penyelesaian. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri</p>

02.01.06	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	77.500.000	0,88	0,88	0	675.000	0,87	675.000	0,87	0	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos : Dokumen dari 6 Dokumen 5. Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA dana Dekonsentrasi : Dokumen dari 19 Dokumen 6. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Faktor Penghambat:</b>  Sesuai target  <b>Faktor Pendukung:</b>  Koordinasi yang baik antara OPD yang satu dengan yang lainnya beserta dengan bidang-bidang di BPKA DIY
02.02	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	18.074.000	26,54	26,54	0	4.748.000	26,27	3.776.000	20,89	5,38				
02.02.01	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan 2. Evaluasi RAPBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Evaluasi RAPBD Kabupaten Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Evaluasi RAPBD Kabupaten Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Evaluasi RAPBD Kabupaten Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Evaluasi RAPBD Kabupaten Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>

02.02.02	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Evaluasi RPAPBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah													<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Menerbitkan dan menyampaikan surat Kepala BPKA Nomor 100.3.2/2137 tanggal 8 Maret 2024 kepada OPD-OPD perihal Permohonan Personil Tim Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>Saat ini sedang dalam proses evaluasi Gubernur.</p>

02.02.03	5.02.02.1.02.0004	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	61,15	61,15	0	3.056.000	61,12	2.084.000	41,68	19,44	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	<p>4. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>- Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 972.000,- pada belanja makan dan minum rapat dalam proses SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.</p>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan											Bidang Akuntansi	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terselesaikannya dokumen laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2023</p>

02.02.04	5.02.02.1.02.0012	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3.074.000	56,6	56,6	0	1.692.000	55,04	1.692.000	55,04	0	BPKA DIY	Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan	3. Laporan Tugas Pembantuan TA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai target <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi bisa dilakukan secara online 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
02.03	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	98.694.000	53,62	53,62	0	29.729.000	30,12	26.801.500	27,16	2,96				
02.03.01	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.410.000	46,5	46,5	0	9.505.000	13,69	9.505.000	13,69	0	BPKA DIY	Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan	1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbitnya berita acara rekonsiliasi pajak pusat untuk pelaporan data pajak semester 2 tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai target <b>Faktor Pendukung:</b>

																	Semangat dari OPD dalam mendata secara manual dan koordinasi yang baik dengan pengkompilasi di BPKA, sangat menentukan tercapainya angka yang disepakati dalam rekonsiliasi
02.03.02	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.284.000	70,5	70,5	0	20.224.000	69,06	17.296.500	59,06	10						<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait : 0 Dokumen dari 8000 Dokumen</p> <p>2. Dokumen SP2D : 7115 Dokumen dari 8000 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Menerbitkan SPD2D</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Aplikasi penatausahaan keuangan saat ini, selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi. Terkadang tidak dapat diakses, sering pula lemot.</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 2.927.500,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 502.000,-</p> <p>2. Belanja bahan komputer Rp. 1.750.500,- dan Belanja makan minum rapat Rp. 675.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>OPD sudah banyak yang paham dengan aliran kas kegiatan yang dimilikinya. Jadi hal ini lumayan memberi kelancaran dalam proses permohonan pencairan.</p>

02.04	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	174.988.900	54,95	54,95	0	85.121.900	48,64	55.072.400	31,47	17,17							
02.04.01	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.723.700	28,87	28,87	0	2.423.700	27,78	1.223.700	14,03	13,75	BPKA DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan	1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran : 0 Laporan dari 12 Laporan 2. Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran : 6 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>Terlaksananya koordinasi dan penjelasan SE Penyusunan LK Semesteran dan Prognosis</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- beupa belanja makan dan minum rapat</li> <li>- Aplikasi SIPD belum bisa mencetak per KPA</li> <li>- Data persediaan dan aset belum valid</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol>			
														1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi : 0 Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>			



02.04.02	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.926.500	100	100	0	17.551.500	83,87	17.188.000	82,14	1,73	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Akuntansi	<p>2. Laporan Keuangan UnAudited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>1. Terselesaikannya cetak laporan keuangan un audited Tahun anggaran 2023</p> <p>2. Terlaksananya Rekonsiliasi Informasi Keuangan Daerah</p> <p>3. Terselesaikannya cetak laporan keuangan Audited TA 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 363.500,- merupakan sisa belanja / efisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SIPD sudah bisa digunakan untuk proses penyusunan laporan keuangan</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
														<p>1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terselesaikannya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>

02.04.03	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	54.202.800	72,46	72,46	0	34.702.800	64,02	27.537.800	50,81	13,21	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Akuntansi	3. Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	2. Terselesaikannya dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi 03.00 <b>Faktor Penghambat:</b> - Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.7.165.000,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 31.000,- 2. Belanja kertas dan coverRp. 64.000,- 3. Belanja bahan cetak Rp. 7.070.000,- di karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan - Aplikasi SIPD belum bisa mencetak lampiran raperda secara sempurna - Aplikasi SIPD belum bisa mencetak laporan per KPA - Data persediaan dan aset belum valid <b>Faktor Pendukung:</b> Data SIPD bisa diolah secara manual
02.04.04	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.694.900	100	100	0	3.694.900	100	3.469.900	93,91	6,09	BPKA DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Berkeekonomian	1. Jumlah Dokumen Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. LHP BPK atas Laporan Keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terselesaikannya dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD <b>Faktor Penghambat:</b> Selesai sesuai target, terdapat efisiensi sebesar Rp. 225.000,- <b>Faktor Pendukung:</b>

		Pelaksanaan APBD										Perekonomian		
													<p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>	
02.04.05	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.753.000	100	100	0	4.753.000	100	2.653.000	55,82	44,18	BPKA DIY	<p>Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Tuntutan TPRGR : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melakukan koordinasi terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</p> <p>2. Melakukan upaya penagihan melalui pengiriman surat tagihan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Terdapat deviasi sebesar Rp. 2.175.000,- belum di laksanakan berupa : 1. Belanja cetak sebesar Rp. 1.575.000,- dan 2, Belanja makan minum rapat Rp. 525.000,- karenabelum ada tindak lanjut dari yang berwenang</p> <p>- Surat tidak tersampaikan kepada pihak yang dituntut (pindah alamat, tidak ada penerima surat, dll)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Pihak - pihak yang kooperatif dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi</p>

02.04.06	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.306.000	5,6	5,6	0	0	0	0	0	0	0	BPKA DIY	Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan	<p>1. Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Koordinasi internal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>
02.04.07	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	7.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKA DIY	Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian	<p>1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi : 0 Orang dari 80 Orang</p> <p>2. Sumber Daya Manusia yang handal dan Kompeten : 0 Orang dari 80 Orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
															<p>1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina : 0 Lembaga dari 8 Lembaga</p> <p>2. RS Jiwa Grhasia : 1 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. RS Respira : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada bulan Maret 2024 kemarin dilaksanakan Sosialisasi E-BLUD dari Kemendagri yang diselenggarakan di Yogyakarta. Mengundang pembina BLUD dari Pemda DIY dan perwakilan dari BLUD di DIY.</p>

02.04.08	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	21.996.000	100	100	0	21.996.000	100	3.000.000	13,64	86,36	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>4. Balabkes : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>5. Bapelkes : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>6. BLPT : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>7. SMK N 6 Yogyakarta : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>8. SMK N 1 SEwon : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>9. SMK N 3 Wonosari : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p>	<p>Pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2024 dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPK BLUD Triwulan 1 Tahun 2004.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Deviasi keuangan sebesar Rp. 18.846.000,- terdiri dari : 1. Belanja honorarium narasumber Rp. 9.600.000,- dan Belanja Perjalanan dinas sebesar Rp. 9.396.000,- disebabkan oleh faktor eksternal. Anggaran tersebut diperuntukkan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi E BLUD oleh Pemda DIY dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri, namun ternyata terdapat perubahan kebijakan oleh Kemendagri bahwa pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia sebagai rekanan Kemendagri dalam</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024  2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY  3. SDM yang kompeten</p>
----------	-------------------	--	------------	-----	-----	---	------------	-----	-----------	-------	-------	----------	---	--	--

02.05	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	#####	59,07	59,07	0	823.325.561.589	57,2	609.952.953.411	42,38	14,82								
02.05.01	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2.835.355.556	25,96	25,96	0	623.540.000	21,99	612.804.020	21,61	0,38	BPKA DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah : 0 Laporan dari 6 Laporan  2. Deviden BUKP : 0 Laporan dari 1 Laporan  3. Deviden BUMD : 0 Laporan dari 1 Laporan  4. Audit KAP terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun Buku N-1 : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Keputusan Kepala BPKA tentang RKAT 2025 selambat-lambatnya November 2024 : 0 Laporan dari 1 Laporan  7. Laporan Hasil analisis Investasi Pemerintah Daerah, Nilai NPL BUKP : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terselesaikannya Audit KAP terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2023  Terselesaikannya Laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun Buku N-1 Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 196/KEP/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2023.  Dalam proses Penetapan Pembagian Laba Bersih BUKP  Terlaksananya Seleksi Calon Anggota Direksi BUMD  <b>Faktor Penghambat:</b>  Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.735.980,- terdiri dari : 1. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 1.230.000,- dan Belanja jasa konsultasi bidang keuangan berupa belanja honorarium sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisa pengadaan sebesar Rp. 3.505.980,-  <b>Faktor Pendukung:</b>				

																				Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.	
																				<p>1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Penyaluran Bantuan Keuangan Kota Yogyakarta : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten Sleman : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya koordinasi alur pencairan penyaluran Bantuan Keuangan</p> <p>2. Tersalurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Kulonprpgg untuk keg. padat karya infrastruktur TA 2024</p> <p>3. Tersalurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Bantul yang bersifat khusus urusan keistimewaan tahap II TA 2024</p> <p>4. Tersalurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Kulonprogo yang bersifat khusus urusan keistimewaan tahap II TA 2024</p> <p>5. Tersalurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Sleman hargobinangun Pakem untuk keg. Padat karya jogja istimewa</p>

02.05.02	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	572.068.456.650	83,3	83,3	0	461.726.769.620	80,71	380.313.546.888	66,48	14,23	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>6. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan Mardikorejo Tempel untuk keg. arsitektur gaya Yogyakarta (RTLH)</p> <p>7. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta yang bersifat khusus untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada</p> <p>8. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, yang bersifat khusus untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kendala yang dihadapi berasal dari faktor eksternal :</p> <p>1. Realisasi fisik berkas pengajuan BKK sesuai target akan tetapi realisasi keuangan menyesuaikan ketersediaan dana dari pusat</p> <p>2. Pencairan terkendala dengan belum disertakannya APBKal sebagai salah satu syarat pencairan. Hal ini disebabkan APBKal belum ditetapkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p>
----------	-------------------	--	-----------------	------	------	---	-----------------	-------	-----------------	-------	-------	----------	---	---



																2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten
02.05.03	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.607.995.743	51	51	0	7.803.997.870	50	0	0	50	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Belanja Tidak Terduga/Darurat : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan fisik yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran bersifat persediaan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten	
														1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengelolaan Dana Bagi Hasil : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersalurkannya dana Bagi hasil pajak rokok bulan Desember 2023 dan Triwulan I TA 2024 kepada pemerintah Kabupaten bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan sleman 2. Tersalurkannya dana Bagi hasil pajak rokok bulan Desember 2023 dan Triwulan I TA 2024 kepada Pemerintah kota Yogyakarta	

02.05.04	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	848.882.026.968	43	43	0	353.171.254.099	41,6	229.026.602.503	26,98	14,62	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	3. Tersalurkannya dana bagi hasil pajak daerah bulan Februari dan maret TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Kulon progo, Gunungkidul dan Sleman 4. Tersalurkannya dana bagi hasil pajak daerah bulan Februari dan maret TA 2024 pada Pemerintah Kota Yogyakarta <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya pencabutan kebijakan terkait PerGub nomer 89/ Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil, sehingga pencairan dana bagi hasil mengalami kemunduran dari yang di rencanakan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. SDM yang kompeten	
3	05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.244.301.500	72,64	72,64	0	719.743.500	32,07	645.443.151	28,76	3,31				
03.01	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.244.301.500	72,64	72,64	0	719.743.500	32,07	645.443.151	28,76	3,31				
														1. Jumlah Standar Harga yang Disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen SHBJ : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Desk Pencermatan Usulan SHBJ Redesain I Dais

03.01.01	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	301.710.000	90	90	0	11.710.000	3,88	2.565.000	0,85	3,03	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	<p>- SK Gub tentang SHS Barang dan SHS Jasa TA 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1- Usulan SHS belum dilengkapi data dukung sesuai SE.</p> <p>- Terdapat OPD yang terlambat dalam pengajuan SHS. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 9.145.000,- terdiri dari : Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 3.345.000,- dan Belanja honorarium Narasumber Rp. 5.800.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Surat usulan dilengkapi SPTJM dan survey harga/RAB. Data survey sudah tersedia. Mempermudah proses dalam proyeksi dan penetapan shbj tahun mendatang</p>
03.01.02	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.049.600	100	100	0	54.049.600	100	53.288.450	98,59	1,41	BPKA DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	<p>1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen RKBMD : 1 Doukumen dari 1 Doukumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Menerbitkan SK RKBMD 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat temuan BPK untuk menambahkan lokasi penempatan dan rencana penggunaan barang sehingga diperlukan pengembangan aplikasi yang berbeda dari tahun sebelumnya</p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 761.150,- adalah efisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

																		koordinasi dengan OPD terkait penyusunan RKBMD 2025 mulai dilaksanakan dan disesuaikan dengan Renja	
03.01.03	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	290.449.000	20,2	20,2	0	57.949.000	19,95	56.969.930	19,61	0,34			BPKA DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	<p>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah : 0 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset Tetap dan Aset Lainnya : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Persediaan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terselesaikannya pengembangan aplikasi aset tetap</p> <p>Pendampingan /Bimtek aplikasi Aset tetap dan Inventarisasi BMD tahun 2024</p> <p>Pendampingan /Bimtek aplikasi Persediaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Proses pengentryan aplikasi Aset Tetap tahun 2024 dan Inventarisasi BMD menunggu koreksi BPK (LHP BPK RI 2023)</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 980.000,- adalah sisa jasa aplikasi aset</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Pengembangan Aplikasi SIM Aset dapat memudahkan pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Inventarisasi BMD</p>		
																		<p>1. Laporan Pengamanan BMD : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Polis Asuransi BMD (bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas) : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Proses Pemilihan mitra KSP BMD Pemda DIY</p> <p>Pembayaran rutin untuk Pengamanan BMD berupa tenaga keamanan dan listrik BMD idle.</p>

03.01.04	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.120.650.200	81,5	81,5	0	342.191.900	30,54	282.907.171	25,24	5,3	BPKA DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	<p>Pengumuman Calon Peserta KSP lolos Kualifikasi Administrasi dan Teknis untuk ke proses selanjutnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> ada pihak BUMD yang aset nya menjadi satu dengan BMD Pemda DIY sehingga proses koordinasi dan penyesuaian proses perlu lebih mendapat perhatian</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 64.284.729,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja makan minum rapat Rp. 2.355.000,-</p> <p>2. Belanja jasa keamanan Rp. 13.760.000,-</p> <p>3. Belanja tagihan listrik sebesar Rp. 34.644.163,-</p> <p>4. Belanja registrasi/keanggotaan Rp. 13.424.320,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> inventaris dan dokumen BMD yang akan di kerjasamakan lengkap sehingga tinggal melengkapi teknis untuk KAK dan dokumen pemilihan. Dokumen Pemilihan cukup detail dan rigid dalam persyaratan sehingga proses pemilihan calon mitra KSP sesuai dengan rencana</p>	
														<p>1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah : 0</p> <p>Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan Kajian Pemanfaatan BMD : 0</p> <p>Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>penilaian BMD tahap 1 untuk BMD idle telah dilaksanakan dan usulan dari OPD</p>

03.01.05	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	210.799.700	70	70	0	70.000.000	33,21	69.197.400	32,83	0,38	BPKA DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	3. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Rapat Koordinasi intern pemda DIY dan cek lokasi  penilaian tahap 1 telah dilaksanakan untuk 8 lokasi <b>Faktor Penghambat:</b> BMD yang akan dinilai cukup banyak sehingga dibagi 2 tahap di semester 1 dan 2 tergantung dari prioritas. Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 802.600,- adalah sisa pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> untuk BMD idle data cukup tersedia sehingga objek yang akan dinilai memiliki historis yang mempermudah penilaian.
														1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Dokumen Pemindahtanganan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen  3. Dokumen Pemusnahan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  *- Penjualan BMD berupa:  1. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

03.01.06	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	266.643.000	69,45	69,45	0	183.843.000	68,95	180.515.200	67,7	1,25	BPKA DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	<p>4. Dokumen Penghapusan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional.</p> <p>3. Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan.</p> <p>4. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit.</p> <p>6. Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPPTG) Unit Fasilitas Kemasan yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab Sleman D.I. Yogyakarta.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat banyak peserta lelang yang mendaftar (setor jaminan penawaran), tapi tidak semuanya memasukkan surat penawaran.</p>
----------	-------------------	---	-------------	-------	-------	---	-------------	-------	-------------	------	------	----------	--	--

														Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.327.800,- terdiri dari : Belum di laksanakan : 1. Belanja sewa angkutan barang Rp. 1.000.000 ,- 2. Belanja jasa tenaga keamanan Rp. 480.000  Terdapat efisiensi pengadaan sebesar Rp. 1.772.800,- <b>Faktor Pendukung:</b> *- Lelang Pemda DIY banyak peminat. - Semua BMD laku terjual
4	05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.349.547.500	70,28	70,28	0	779.432.100	23,27	746.416.990	22,28	0,99			
04.01	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.349.547.500	70,28	70,28	0	779.432.100	23,27	746.416.990	22,28	0,99			
													<p>1. Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah: DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah: DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terselesaikannya Pengadaan Plastik TBPKP</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Info PKB DIY</p> <p>Terlaksananya Operasi Gabungan Pelayanan di Samsat Corner Galeria Mall</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan cukup tinggi sebesar Rp. 28.861.560,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 551.800,-</p>



04.01.01	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3.241.398.400	71,14	71,14	0	731.169.400	22,56	702.554.840	21,67	0,89	BPKA DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Pajak Daerah	<p>2. Belanja bahan komputer Rp. 4.022.760,-</p> <p>3. Belanja alat listrik Rp. 560.000,- efisiensi</p> <p>4. Belanja makan minum aktivitas lapangan Rp. 6.860.000,-</p> <p>5. Belanja honor tim pelaksana kegiatan Rp. 3.000.000,-</p> <p>6. Belanja jasa pelayanan umum Rp. 8.040.000,-</p> <p>7. Belanja perjalanan dinas tetap Rp. 15.280.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan plastik TBPKP menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif karena melalui e-katalog</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p>	
														<p>1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan Dana Keistimewaan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DID : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penggandaan dan Jilid Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap I sebagai salah satu syarat salur Dana Keistimewaan DIY Tahap II</p> <p>2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2024</p>

04.01.02	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	17.849.100	88,31	88,31	0	15.762.550	88,31	11.502.000	64,44	23,87	BPKA DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Retribusi Daerah	<p>4. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DAK Fisik : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DAK Non Fisik : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DBH : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>3. Rapat Koordinasi Pengembalian Dana BOSP</p> <p>4. Rapat Koordinasi Penggunaan Sisa DBH CHT TA 2023 dan Tambahan DBH CHT</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1.a. Penggandaan dan Jilid Laporan Tahunan Dana Keistimewaan tidak terealisasi karena berdasarkan rapat koordinasi disepakati bahwa Paniradya Kaistimewaan yang bertugas untuk membuat Laporan Tahunan.</p> <p>1.b. Penggandaan dan Jilid Laporan Realisasi Penyerapan DAIS untuk syarat salur Tahap I tidak terealisasi karena terdapat PMK baru, yaitu PMK Nomor 163 Tahun 2023 yang mengatur bahwa dokumen syarat salur DAIS Tahap I adalah Laporan Tahunan, tidak perlu Laporan Realisasi Penyerapan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>2. Koordinasi dengan OPD Pengelola DAK Fisik dan Kanwil DJPb DIY berjalan dengan lancar</p>
----------	-------------------	--	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	-------	----------	---	---	---

																			3. Koordinasi dengan OPD Pengelola DAK Nonfisik berjalan dengan lancar 4. Koordinasi berjalan dengan baik antara Pemerintah Kab/Kota dan Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat yaitu DJPK Kementerian Keuangan
04.01.03	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	57.300.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKA DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Pajak Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>		
04.01.04	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000	100	100	0	32.000.000	100	31.860.000	99,56	0,44		BPKA DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan Alat Perforator Bermesin 2. Pemeliharaan Alat Perforator Tidak Bermesin <b>Faktor Penghambat:</b> Sudah sesuai target, terlaksana dengan baik, terdapat efisiensi sebesar Rp. 140.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> Pemeliharaan perforator terlaksana dengan baik sehingga perforator dapat digunakan kembali dengan lancar			
		Elektronifikasi Transaksi												Bidang Anggaran Pendapatan -	1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Laporan Perkembangan ETPD Semester 1 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Perkembangan ETPD Semester 2 : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksananya penggandaan laporan ETPD  <b>Faktor Penghambat:</b>			

04.01.05	5.02.04.1.01.0014	EKSEKUSI TRANSAKSI Pemerintah Daerah	999.950	50,02	50,02	0	500.150	50,02	500.150	50,02	0			BPKA DIY	Pengapatan - Subbidang Retribusi Daerah	Terlaksana Sesuai target
<b>Jumlah</b>			#####	58,15	58,15		857.530.835.512	55,96	638.134.750.331	41,64						<b>Faktor Pendukung:</b> Pengisian Rincian Realisasi Transaksi Keuangan Daerah untuk setiap kanal pembayaran pada semester I telah selesai sehingga tercapainya Laporan Indeks ETPD Semester I